

Budaya Kerja Optimal Adminstrasi Keuangan: Studi Implementasi di Kantor Kecamatan

Rani Nurul Laili Herzegovina ¹

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia dan Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia; akugovina23@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal
Adminstrative Science

Vol 4 No 1 Mei 2023 <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4i1.45>

Received: March 30, 2023
Accepted: April 28, 2023
Published: May 17, 2023

Publisher's Note: Program Study Office Adminstrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Local income is the amount of money that a region receives through its regional treasury account, either as compensation for its own efforts or as a consequence of aid from the federal government or other authorized sources. The Padang District Office plays a crucial part in managing the sub-district's financial administrative issues, including budget preparation, cash holders' treasury, bookkeeping, and financial accountability in compliance with legal requirements. This study used a qualitative technique combined with a descriptive methodology for its research. The Head of Padang District Office's Program and Budget Subdivision is directly interviewed for data gathering, and documentation is also used. The goal of this study is to assess the efficiency of the Regional Revenue and Expenditure Budget's implementation and determine whether the District Office's preparation of the budget complies with Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2020. The research's findings demonstrate that the Padang District Office's budget preparation process complies with Minister Regulation Number 64 of 2020, and that the budget for the fiscal year 2022–2023 has an efficiency level of 92%, or is considered to be efficient. The Padang District Office routinely examines the executed budget, whether it comes from the financial supervisor or the district office budget users.

Keywords: Local government budget.

Pendahuluan

Pendapatan daerah adalah penerimaan uang yang diterima daerah melalui rekening kas daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari yang lain dan sah. Undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah menurut asas ekonomi dan tugas Membantu mengelola urusan administrasi mereka sendiri.

APBD bertanggung jawab untuk mengatur urusan tata usaha negara dalam wilayah hukum daerah dan beban yang mendasari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Pasal 19 Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya 17 Tahun 2003, menyebutkan bahwa sehubungan dengan Penyusunan RAPBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika perencanaan anggaran membuat rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja. Mahmudi (2016) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai bagan organisasi untuk tindakan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan rencana program yang akan datang.

Halim dan Kusufi (2016) mengatakan anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja berupa pendapatan dan pengeluaran yang direpresentasikan dalam jumlah uang yang akan dicapai dalam periode tertentu dan berisi data historis dalam bentuk. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Kecamatan Padang memiliki beberapa rencana strategis berupa program dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang jelas, yang kemudian ditetapkan sesuai dengan sasaran anggaran.

Renstra organisasi perangkat daerah merupakan hasil penjabaran visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan menjadi program dan tindakan yang terukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan program. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menerima rencana organisasi pembangunan daerah, yang dianalisis urgensinya, kemudian membantu organisasi perangkat daerah dalam menentukan skala prioritas, dll, yang digunakan sebagai bahan untuk mempersiapkan perangkat daerah. perkembangan. rencana kerja RKPD), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah (KUA) dan Besaran Maksimal Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas.

Pendapatan dan belanja daerah dikelola dengan prinsip bahwa semua pendapatan baik berupa uang, barang maupun jasa harus dianggarkan. Seluruh pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan dianggarkan dalam jumlah bruto. Tingkat pendapatan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung perencanaan pengeluaran, dukungan pendapatan harus disubsidi secara memadai dan sesuai dengan ketentuan hukum. Di kantor kecamatan Padang, anggaran seringkali tidak digunakan secara optimal. Alasan tidak semua dana digunakan adalah efisiensi. Akibat pandemi Covid-19, ada beberapa anggaran yang tidak setengah-setengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1. 64 Tahun 2020 dan mengetahui apakah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah efektif. Setiap tahun memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terkait

dengan renstra kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja tugas. Selain itu, Dinas Kabupaten Padang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan di kecamatan menurut undang-undang, meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan tanggung jawab keuangan. Kantor Kecamatan Padang juga membuat dan menetapkan pedoman perencanaan yaitu pada tahap pengesahan anggaran tahun 2022. Berdasarkan uraian di bawah ini menjadi dasar bagi penulis untuk judul penelitian “Budaya Kerja Optimal Adminstrasi Keuangan: Studi Implementasi di Kantor Kecamatan”

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme yang mempelajari kondisi objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan mendokumentasikan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen APBD dan mewawancarai pejabat Bagian Ekonomi di Kantor Kecamatan Padang, sedangkan data sekunder diperoleh dengan meninjau laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, lampiran laporan keuangan dan kinerja laporan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara atau tanya jawab langsung dengan dengan Kasubbag Program dan Anggaran Kantor Kecamatan Padang tentang proses penyusunan APBD. juga akan mengurus dokumentasi. Pendokumentasian yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan APBD dikumpulkan dan dipelajari, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kecamatan Padang.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Kecamatan Padang. Kinerja diukur dengan membandingkan pengeluaran anggaran langsung (seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pada tahun berjalan)

terhadap total pengeluaran anggaran pada tahun berjalan. Tingkat efisiensi ditentukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi total anggaran belanja.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penentuan Pedoman Perencanaan

Kantor Kecamatan Padang membenarkan pedoman perencanaan tersebut. Tahap Penyusunan Anggaran Kinerja Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2022. Konfigurasi anggaran didasarkan pada Permendagri nomor 64 tahun 2020. Konfigurasi anggaran didasarkan pada sistem anggaran, visi, misi, tujuan dan sasaran anggaran. kecamatan. kantor dan sistem E-Budgeting

Tahapan proses penyusunan anggaran menurut UU No. 25 Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2004 diawali dengan proses penyusunan RPJP daerah yang meliputi visi, misi, dan arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan daerah. Setelah penetapan RPJP daerah, tugas provinsi selanjutnya adalah penyusunan RPJP daerah yang meliputi penyusunan dan penetapan visi, misi, dan program pemerintahan daerah, dengan memperhatikan RPJP daerah dan RPJP nasional. termasuk RPJM daerah. kebijakan fiskal daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan SKPD.

Setelah itu kita lanjutkan definisi RKPD yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan acuan RPJMD, renstra dan rencana kerja, dan RKP yang memuat peraturan daerah dianggap sebagai dasar penyusunan APBD. Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Keuangan Provinsi No. 34 dan 35. 58 Tahun 2005, di mana kotamadya menyusun prioritas APBD umum dan pagu anggaran sementara berdasarkan RKPD sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri. Informasi tentang petunjuk penyusunan anggaran tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hariyanto, S.A.P selaku karyawan untuk petunjuk perencanaan di kantor kecamatan mengatakan:

“Di Kantor Kecamatan Padang ini, sekretaris kecamatan bertugas untuk membuat perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpedoman pada capaian tahun 2021 sehingga nantinya diharapkan di tahun 2022, capaian rencana anggaran akan lebih efisien lagi, dan Penentuan anggaran berpedoman dengan Sistem E-Budgeting, visi, misi, maksud dan tujuan dari pada Kantor Kecamatan Padang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Hariyanto, S.A.P menyatakan bahwa penetapan anggaran Dinas Kabupaten Padang berpedoman pada sistem anggaran elektronik, visi, misi dan tujuan serta sasaran. Bersamaan dengan itu, penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kantor kecamatan Padang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 telah disiapkan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa sekretaris camat menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kantor Kecamatan Padang dan akan ditindaklanjuti oleh Camat melalui rapat rencana kerja bersama divisi lainnya. Rapat rencana kerja yang dilakukan membahas tentang efektifitas, efisiensi dan keuangan pada Kantor Kecamatan Padang.

2. Analisis Persiapan dan Penentuan Anggaran

Penyusunan anggaran di kantor kecamatan Padang awalnya memakan waktu tiga bulan sebelum proposal anggaran diselesaikan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dalam rapat rencana kerja dengan bagian program dan sub bagian camat. Menteri Keuangan dan Bendahara Camat. Dalam penyusunan anggaran tahun berjalan, Dinas Kabupaten Padang sangat mementingkan pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi anggaran Kantor Kecamatan Padang adalah ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan tingkat pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan kapasitas sumber keuangan Kantor Kabupaten Padang, serta efisiensi, efektivitas dan kapasitas Banding/Dana Desa yang diputuskan oleh APBD dan Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hariyanto, S.A.P. pegawai Kantor Kecamatan Padang mengatakan:

“Anggaran Kantor Kecamatan Padang akan ditetapkan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sebelumnya dan hasil rapat rencana kerja seluruh dinas serta bahan rapat berupa negosiasi untuk menyusun program dan rencana aksi. akan dilaksanakan tahun depan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Hariyanto, S.A.P. menjelaskan bahwa setiap bagian penyusunan anggaran meliputi pembahasan anggaran dan pengesahan anggaran. Saat menetapkan anggaran, tingkat keberhasilan adalah tingkat implementasi yang dicapai. Semakin tinggi tingkat implementasi ketika menggunakan anggaran, semakin besar keberhasilan pencapaian anggaran.

Berdasarkan observasi lapangan penulis, Kantor Kecamatan Padang selalu melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam penyusunan anggaran, karena kebutuhan pemerintah kota selalu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.

3. Analisis Pelaksanaan Anggaran

Di Kantor Kecamatan Padang, anggaran pendapatan dan belanja bulanan disusun setiap tahun dengan mengadakan musrenbang. Hasil analisis pelaksanaan anggaran Kanwil Padang, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun dilaksanakan dengan cukup efektif, menunjukkan persentase keberhasilan program dan operasional yang dicapai setiap tahunnya. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Hariyanto, S.A.P selaku karyawan kecamatan pada pelaksanaan anggaran yang ada di kantor kecamatan mengatakan:

“Di Kantor Kecamatan Padang, tingkat implementasi tahunan anggaran saat ini adalah 80-93 persen. Hampir semua rencana yang sudah jadi dapat dijalankan dengan benar dan tepat sesuai dengan rancangan aslinya”.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, berdasarkan informasi yang ada, baru 92% anggaran Kantor Kecamatan Padang yang sudah terlaksana. Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, mungkin pada tahun 2022, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Beberapa program yang tidak dilaksanakan dengan baik akan diubah nama programnya, dengan harapan dapat dilaksanakan tahun depan. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Padang seperti sosialisasi lomba desa/keluhan terpadu dan sosialisasi kebersihan dan lingkungan mendapat respon positif dari masyarakat. Visi dan misi kecamatan Padang selalu berupaya menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan seefisien mungkin bagi warga Kecamatan Padang. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022, diselenggarakan rapat pengendalian dan evaluasi tahunan baik bagi pengguna anggaran maupun pengawas keuangan.

Beberapa topik yang dibahas dalam sesi monitoring dan evaluasi ini meliputi pelaksanaan fisik dan keuangan perangkat daerah yang bersumber dari APBD dan penerimaan Dana Daerah, Administrasi dan Khusus (DAK) tahun anggaran 2022, serta realisasinya. pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2022. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang baik kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat memperbaiki defisit yang ada. Selain itu, menentukan efektivitas dan efisiensi metode atau metode yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kesimpulan

Dalam menentukan garis perencanaan, Kantor Kecamatan Padang berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Anggaran didasarkan pada sistem e-budget, visi, misi dan tujuan Kantor Kecamatan Padang. Sementara itu, penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kantor (ODP) Kantor Kecamatan Padang berdasarkan perintah Menteri Dalam Negeri telah disusun dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saat menyusun anggaran, Kantor Kecamatan Padang memiliki waktu tiga bulan untuk menyusun anggaran sebelum menyusun anggaran. Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penyelenggaraan rapat rencana kerja dengan Camat, Kepala Divisi Program dan Direktur Keuangan, Sekretaris dan Bendahara Camat

Kantor Kecamatan Padang menetapkan anggaran berdasarkan laporan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan hasil rapat rencana kerja seluruh instansi terkait serta bahan rapat berupa negosiasi penyusunan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan. keluar untuk tahun depan. Musyawarah pengambilan keputusan anggaran Kantor Kecamatan Padang selalu dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk dinas teknis dan kegiatan masyarakat karena kebutuhan masyarakat selalu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran tahunan. dengan melakukan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Kantor Kecamatan Padang melaksanakan anggaran dengan cukup efisien dan melaporkan persentase hasil dan kegiatan program setiap tahun. Dalam wawancara diketahui bahwa 90-95% pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan benar, namun berdasarkan informasi yang ada, sekitar 92% pelaksanaan anggaran dilaksanakan di Kantor Kecamatan Padang. Kantor Kecamatan Padang membuat estimasi setiap tahun baik pengguna anggaran Kantor Kecamatan maupun pengawas keuangan.

Referensi

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfiah, S. (2016). *E-Budgeting*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basri, R. (2012). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Bastian I. (2013). *Pengertian Anggaran Sektor Publik*.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: kencana prenda media
- Fiiazah, I., Safitri, F. O., & Herzegovina, R. N. L. (2020). Penggunaan Fingerprint untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru dan Siswa. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 1(2), 110-121.
- Herzegovina, R. N. L. (2018). *Pengaruh Aktivitas Belajar dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Kearsipan (Studi Pada Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Herzegovina, R. N. L., & Fatah, A. A. (2021). Implementasi Tata Kearsipan di Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Wijaya Kusuma. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 2(2), 177-188.
- Herzegovina, R. N. L., & Hayat, H. (2022). Kualitas Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedungjajang Lumajang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 130-137.

- Herzegovina, R. N. L., & Taufiqurrohman, S. (2022). Sistem Pelayanan Publik Sebagai Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Padang. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 3(2), 120-137.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mentang, F., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 131-138.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara